

## Evaluasi Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Nur Anwar<sup>1\*</sup>, Sutrisno Anggoro<sup>2</sup>, Dwi P Sasongko<sup>3</sup>

<sup>1</sup>)Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

Jl.Imam Bardjo, SH No.5 Gedung Pascasarjana Lt.4 Semarang

<sup>2</sup>)Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>)Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro

\* noeranwar@yahoo.com

### ABSTRACT

*To ensure the sustainability of coastal and marine natural resources, it is necessary in a planned and integrated management and provide maximum benefits to all stakeholders and to minimize the impact and possible conflicts (Dahuri, R, et al, 2001). One of the problems occurred in the coastal areas are habitat degradation, destruction of coastal ecosystems, pollution, resource use conflicts and coastal areas that are not efficient. One major cause of these problems is due to the absence of a comprehensive settlement on the utilization of coastal areas and the use of the distortions existing spatial.*

*This study aimed to evaluate the structure, pattern and spatial compatibility Kaliwungu coastal areas, Kendal, and formulate policy priorities management and use of coastal space Kaliwungu. The study was conducted in the coastal district Kaliwungu Kendal, in July and August 2012. Spatial analysis using Geographic Information Systems (GIS), with the help of Ikonos Satellite Imagery, and then juxtaposed with the Spatial Plan. Analysis of alternative policy approaches Analytical Hierarchy Process (AHP) to program Expert Choice 11.*

*Based on the Ikonos satellite image interpretation with Geographic Information Systems (GIS), the result that pemanfaatan patterns of coastal space for aquaculture with extensive Kaliwungu 4.085 km<sup>2</sup> with a broad settlement 0.936 km<sup>2</sup>, industrial area 1.052 km<sup>2</sup>, the area of 0.105 km<sup>2</sup> mangrove, the port area 0.719 km<sup>2</sup> and a marine tourism area 0.119 km<sup>2</sup>. Deviations utilization of space in the coastal district Kaliwungu is planning to strategic areas of economic and industry are mostly located in the Village area and Village Mororejo Wonorejo not in accordance with the characteristics and criteria for the use of land for the industrial park, with an area of approximately 22,134,954.57 m<sup>2</sup> or approximately 22 km<sup>2</sup>. Based on the analysis of the obtained results are very few areas suitable for the industrial area of 858,561 m<sup>2</sup> and a region corresponding to the industry of approximately 856,891 m<sup>2</sup>. The planning of the coastal zone indicate any incompatibilities several areas that could potentially conflict space utilization.*

*Stakeholder perceptions of the spatial patterns of coastal district is generally looked Kaliwungu important aspect of the environment. Meanwhile, the policy priorities of alternative land use patterns of coastal Kaliwungu District, Kendal regency of environmental aspects is to maintain the protective coastal mangrove forests along the coast Kaliwungu District.*

**Key words:** Kendal coastal, utilization of coastal areas, coastal region compatibility

### 1. PENGANTAR

Sumberdaya pesisir dan lautan merupakan potensi penting dalam pembangunan masa depan, mengingat luas wilayah laut Indonesia adalah 62% dari luas wilayah nasional, belum termasuk Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km<sup>2</sup>. Dengan berbagai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam serta jasa-jasa lingkungan yang diberikan, sumberdaya pesisir dan lautan mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Guna menjamin keberlanjutan sumberdaya alam tersebut, maka pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua pemangku kepentingan, terutama masyarakat pesisir dan meminimalkan dampak serta konflik yang mungkin terjadi (Dahuri, *et al*, 2001).

Pemanfaatan ruang kawasan pesisir merupakan suatu proses yang akan membawa suatu perubahan pada ekosistemnya. Perubahan-perubahan tersebut akan membawa pengaruh pada lingkungan. Semakin tinggi intensitas pengelolaan dan pembangunan yang dilaksanakan berarti semakin tinggi tingkat pemanfaatan sumberdaya, maka semakin tinggi pula perubahan-perubahan lingkungan yang akan terjadi di kawasan pesisir (Dahuri, *et al*, 2001).

Salah satu permasalahan terjadi di wilayah pesisir adalah degradasi habitat, kerusakan ekosistem pesisir, pencemaran, konflik pemanfaatan sumberdaya dan pemanfaatan ruang wilayah pesisir yang tidak efisien. Di antara penyebab utama timbulnya masalah-masalah tersebut adalah belum adanya penataan pemanfaatan yang komprehensif pada wilayah pesisir dan terjadinya penyimpangan-penyimpangan pemanfaatan terhadap tata ruang yang ada. Hal ini diperparah lagi dengan belum adanya alokasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan daya dukung lahan (*carrying capacity*) wilayah tersebut (Rahardjo, 2010).

Salah satu upaya perlindungan yang dapat dilakukan adalah dengan menetapkan suatu kawasan di pesisir dan laut sebagai kawasan pemanfaatan yang kompatibel yang antara lain bertujuan untuk melindungi habitat-

habitat kritis, mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumberdaya, melindungi keanekaragaman hayati dan melindungi proses-proses ekologi serta pemanfaatan secara optimal. Oleh karena itu, maka dibutuhkan penelitian secara ilmiah mengenai analisis pemanfaatan ruang dalam pengelolaan wilayah pesisir dengan studi kasus mengambil lokasi di pesisir Kaliwungu Kendal, guna mengetahui arahan pemanfaatan ruang yang sesuai untuk menghindari perencanaan pengelolaan yang kurang baik.

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengevaluasi pola dan struktur pemanfaatan ruang kawasan pesisir Kaliwungu, Kabupaten Kendal.
2. Mengevaluasi kompatibilitas pemanfaatan ruang kawasan pesisir Kecamatan Kaliwungu Kendal sesuai kaidah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal.
3. Mengetahui persepsi pemerintah, swasta, masyarakat, dan LSM terhadap pola pemanfaatan ruang kawasan pesisir.
4. Merumuskan prioritas kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir Kaliwungu.

## **1.1 Tinjauan Pustaka**

### **A. Pengertian Pesisir**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pasal 1 Angka 1, bahwa “wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut”.

Di Indonesia pengertian yang digunakan adalah wilayah pesisir sebagai wilayah yang merupakan kawasan pertemuan antara daratan dan lautan, ke arah darat meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses yang berkaitan dengan laut atau sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin, sedangkan ke arah laut kawasan pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Dahuri, *et al*, 2001)

Penjelasan umum mengenai kawasan pesisir yang meliputi definisi dan karakteristik wilayah merupakan hal yang sangat penting, hal ini bertujuan agar pemahaman mengenai wilayah pesisir dapat dimengerti dan merupakan awal dari kajian pengembangan kawasan pesisir. Untuk dapat mengelola pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan kawasan pesisir secara berkelanjutan, perlu pemahaman yang mendalam tentang pengertian dan karakteristik dari kawasan ini. Pertanyaan yang sering muncul dalam pengelolaan kawasan pesisir adalah bagaimana menentukan batas-batas wilayah dari suatu kawasan pesisir (Dahuri, *et al*, 2001).

### **B. Pengertian Kawasan Pesisir**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, terkait definisi kawasan pesisir pada Pasal 1 Angka 8 disebutkan bahwa “Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya”. Selanjutnya dalam undang-undang tersebut pada Pasal 1 Angka 9 dan Angka 10 juga memuat beberapa pengertian kawasan sebagai berikut : Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

### **C. Konsep Zonasi Pesisir**

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 9 Ayat (1) dinyatakan bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selanjutnya disingkat RZWP-3-K, merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan pasal tersebut diatas terdapat pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dijelaskan bahwa RZWP-3-K Kabupaten/Kotamerupakanarahanpemanfaatansumberdaya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah Kabupaten/Kota. Rencana Zonasi Rinci WP-3-K Kabupaten/Kota adalah rencana detail dalam 1 (satu) zona dan/atau satu unit perencanaan berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi WP-3-K Kabupaten/Kota.

#### **D. Konsep Penataan Ruang di Indonesia**

Pengaturan tata ruang secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut Undang-undang tersebut, bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administrasi, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

#### **E. Kompatibilitas Perencanaan Zonasi**

Gatot, (2009), berpendapat bahwa untuk mewujudkan pengelolaan terpadu, maka lembaga-lembaga yang terkait dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan harus mengetahui kegiatan apa saja yang dapat dan tidak dapat dipadukan dan bagaimana cara memadukannya. Secara sederhana Gatot, berpendapat bahwa dua kegiatan atau lebih dapat dipadukan apabila memenuhi asas kompatibilitas yang terdiri dari tiga macam, yaitu *complete compatibility*, *partial compatibility* dan *incompatibility*. *Complete compatibility* terjadi apabila dua atau kegiatan atau lebih dapat berlangsung bersamaan dalam ruang dan waktu yang sama; *partial compatibility*, terjadi apabila dua kegiatan atau lebih dapat dilakukan secara berurutan dalam ruang yang sama, namun dalam waktu yang berbeda; dan *incompatibility* terjadi apabila dua kegiatan tidak dapat dilakukan secara bersamaan atau berurutan dalam ruang yang sama.

## **2. METODOLOGI**

### **2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di kawasan pesisir Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2012. Pemilihan lokasi sampling dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*), hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal tahun 2011–2031, dalam kawasan ini diarahkan untuk pemanfaatan kawasan industri dan pelabuhan.

Kajian yang dilakukan adalah studi kasus dan jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan informasi dan data lapangan untuk selanjutnya diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder.

### **2.2 Populasi dan Sampel**

Penentuan sampel diperoleh dari para pemangku kepentingan dari populasi yang tepat dengan tujuan tertentu, atau yang mengetahui secara pasti kondisi sosial budaya masyarakat di kawasan pesisir. Penentuan responden untuk data kuisioner yang dibutuhkan dilakukan pada para pemangku kepentingan yang berkepentingan terhadap pemanfaatan ruang kawasan Pesisir Kaliwungu.

Dalam penelitian ini untuk menganalisis pemanfaatan ruang kawasan pesisir Kaliwungu akan dilakukan berbagai pendekatan, yaitu: analisis kompatibilitas untuk mengetahui kesesuaian kondisi pemanfaatan ruang kawasan pesisir secara in situ antar arahan alokasi ruang dalam satu wilayah Kecamatan Kaliwungu dan daerah sekitarnya.

Untuk membantu memudahkan proses identifikasi bentuk pemanfaatan ruang kawasan pesisir secara eksisting akan digunakan media penginderaan jauh dan analisis Sistem Informasi Geografis (SIG). Sedangkan untuk mengetahui dan mendalami persepsi pemangku kepentingan terhadap pola pemanfaatan ruang pesisir akan dilakukan dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (Saaty, 1993), dengan bantuan perangkat lunak *Expert Choice 11*.

### **2.3 Metode Evaluasi**

Untuk melakukan evaluasi terhadap pola pemanfaatan ruang kawasan pesisir Kaliwungu dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria. Kriteria teknis yang digunakan untuk evaluasi perencanaan pemanfaatan ruang kawasan pesisir Kecamatan Kaliwungu mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya sebagai berikut :

Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan kawasan peruntukan industri yang berorientasi bahan mentah:

1. Kemiringan lereng : kemiringan lereng yang sesuai untuk kegiatan industri berkisar 0% - 25%, pada kemiringan >25% - 45% dapat dikembangkan kegiatan industri dengan perbaikan kontur, serta ketinggian tidak lebih dari 1000 meter dpl;
2. Hidrologi : bebas genangan, dekat dengan sumber air, drainase baik sampai sedang;

3. Klimatologi : lokasi berada pada kecenderungan minimum arah angin yang menuju permukiman penduduk;
4. Geologi : dapat menunjang konstruksi bangunan, tidak berada di daerah rawan bencana longsor;
5. Lahan : area cukup luas minimal 20 ha; karakteristik tanah bertekstur sedang sampai kasar, berada pada tanah marginal untuk pertanian.

Untuk menentukan tingkat kompatibilitas antar kawasan pesisir Kaliwungu menggunakan kriteria sebagai berikut (Bengen dan Burhanuddin, 2003) :

1. Ancaman; didasarkan pada tingkat perubahan pola pemanfaatan kawasan terhadap ancaman perubahan kawasan yang lain.
2. Kerentanan; didasarkan pada tingkat pengaruh kawasan terhadap kepekaan kerentanan atau degradasi kawasan yang lain.
3. Produktivitas; didasarkan pada tingkat produktivitas suatu kawasan dapat memberikan keuntungan pada kawasan yang lain.
4. Konflik kepentingan; didasarkan pada tingkat dimana pemanfaatan suatu kawasan dapat menimbulkan konflik terhadap kawasan yang lain.

#### **2.4 Analisis Pemanfaatan Ruang**

Sistem Informasi Geografi yang selanjutnya disingkat SIG, digunakan untuk menganalisis spasial pola pemanfaatan ruang di kawasan pesisir Kaliwungu Kendal, berdasarkan identifikasi pola pemanfaatan ruang dan bentuk-bentuk kegiatan yang ada kemudian disandingkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang ada.

Adapun kriteria-kriteria yang digunakan sebagai acuan untuk evaluasi pola pemanfaatan ruang kawasan peruntukan industri berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya.

### **3. HASIL DAN DISKUSI**

#### **3.1 Kondisi Geografis**

Luas wilayah Kecamatan Kaliwungu berkisar 47,73 km<sup>2</sup> dan sebagian besar berupa tambak seluas 14,90 km<sup>2</sup> atau 31,22 %. Sedangkan selebihnya digunakan untuk pabrik, jalan, dan tanah kering berkisar 11,84 km<sup>2</sup> atau 24,80 %, untuk lahan sawah 9,44 km<sup>2</sup> atau 19,78 %, tanah permukiman atau pekarangan 6,29 km<sup>2</sup> atau sebesar 13,18 %, untuk hutan berkisar 2,87 km<sup>2</sup> atau sebesar 6,01 % dan luasan yang paling kecil untuk tegalan berkisar 2,39 km<sup>2</sup> atau 5,01 %.

#### **3.2 Pola dan Struktur Pemanfaatan Ruang Pesisir Kaliwungu**

Berdasarkan hasil interpretasi citra satelit Ikonos dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) diperoleh hasil bahwa pola pemanfaatan ruang terkini kawasan pesisir Kaliwungu untuk pertambakan dengan luas 4,085 km<sup>2</sup> (17%), permukiman dengan luas 0,936 km<sup>2</sup> (4%), kawasan industri 1,052 km<sup>2</sup> (4%), kawasan mangrove 0,105 km<sup>2</sup> (0,01%), kawasan pelabuhan 0,719 km<sup>2</sup> (3%) dan kawasan wisata bahari 0,119 km<sup>2</sup> (1%).

#### **3.3 Pola dan Struktur Ruang Kawasan Pesisir Kaliwungu Kabupaten Kendal berdasarkan Perda Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Berdasarkan Perda Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah periode 2011-2031 telah ditentukan beberapa kawasan peruntukan di wilayah Kecamatan kaliwungu. Untuk wilayah penelitian yang mencakup Desa Wonorejo, Karangtengah dan Desa Mororejo luas kawasan strategis ekonomi adalah 0,788 km<sup>2</sup> atau sekitar 3%, kawasan strategis industri 2,54 km<sup>2</sup> atau 11%, kawasan lindung 0,339 km<sup>2</sup> dan kawasan lainnya 20,17 km<sup>2</sup> atau 85 % dari total luas daerah wilayah penelitian (Gambar 1).

#### **3.4 Penyimpangan Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal**

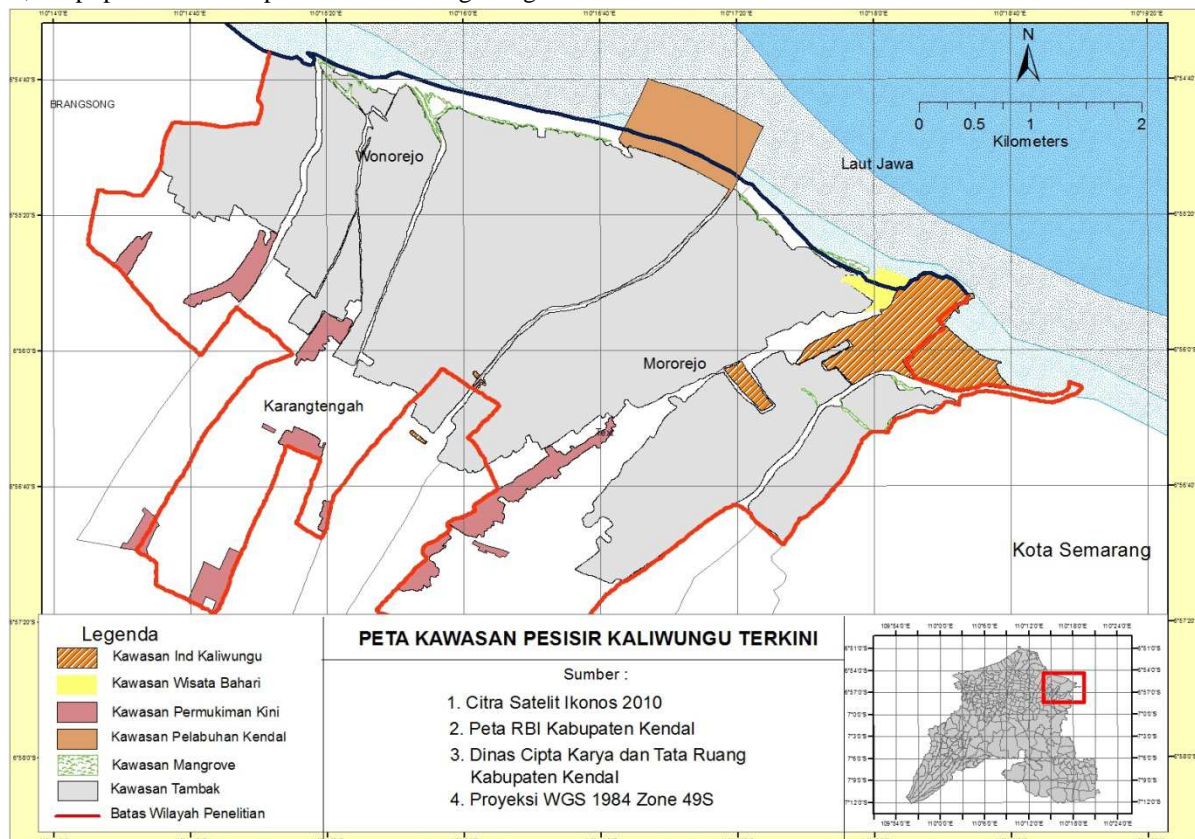
Luas kawasan pada kondisi eksisting kawasan pesisir Kaliwungu Kabupaten Kendal, yang sebagian berupa pertambakan akan berubah fungsinya sebagai kawasan strategis ekonomi dan industri serta kawasan perikanan dan hanya sebagian proporsi digunakan untuk kawasan lindung pantai.



Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 5 Ayat (2) disebutkan bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. Dalam Pasal 17 Ayat (4) disebutkan bahwa peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya Kawasan menjelaskan bahwa kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya buatan. Dalam RTRW Kabupaten Kendal periode 2011-2031, Kecamatan Kaliwungu ditetapkan sebagai kawasan strategis industri dan sebagian besar berada di Desa Wonorejo dan Desa Mororejo.

### 3.4 Analisis Zonasi Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Berdasarkan observasi lapang dan analisis kondisi eksisting dengan SIG, diketahui bahwa pemanfaatan ruang untuk kawasan industri dikomparasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal terdapat kawasan industri yang pada saat ini sudah beroperasi tetapi tidak diakomodasi dalam kawasan rencana strategis industri. Selain itu ada sebagian wilayah dimana sesuai RTRW Kabupaten Kendal diperuntukkan sebagai kawasan lindung di sepanjang pantai, tetapi pada saat ini dipertuntukkan sebagai bagian kawasan industri.



Gambar 1. Peta Kawasan Pesisir Kaliwungu Terkini

Berdasarkan RTRW Kabupaten Kendal periode 2011-2031, bahwa kawasan lindung di sepanjang sempadan sungai dan sempadan pantai sekaligus direncanakan sebagai kawasan perikanan/budidaya. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya, dimana hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 11 Ayat 1 huruf a juga menyebutkan bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) Kabupaten/Kota berisi arahan tentang alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur. Sehingga dapat diambil

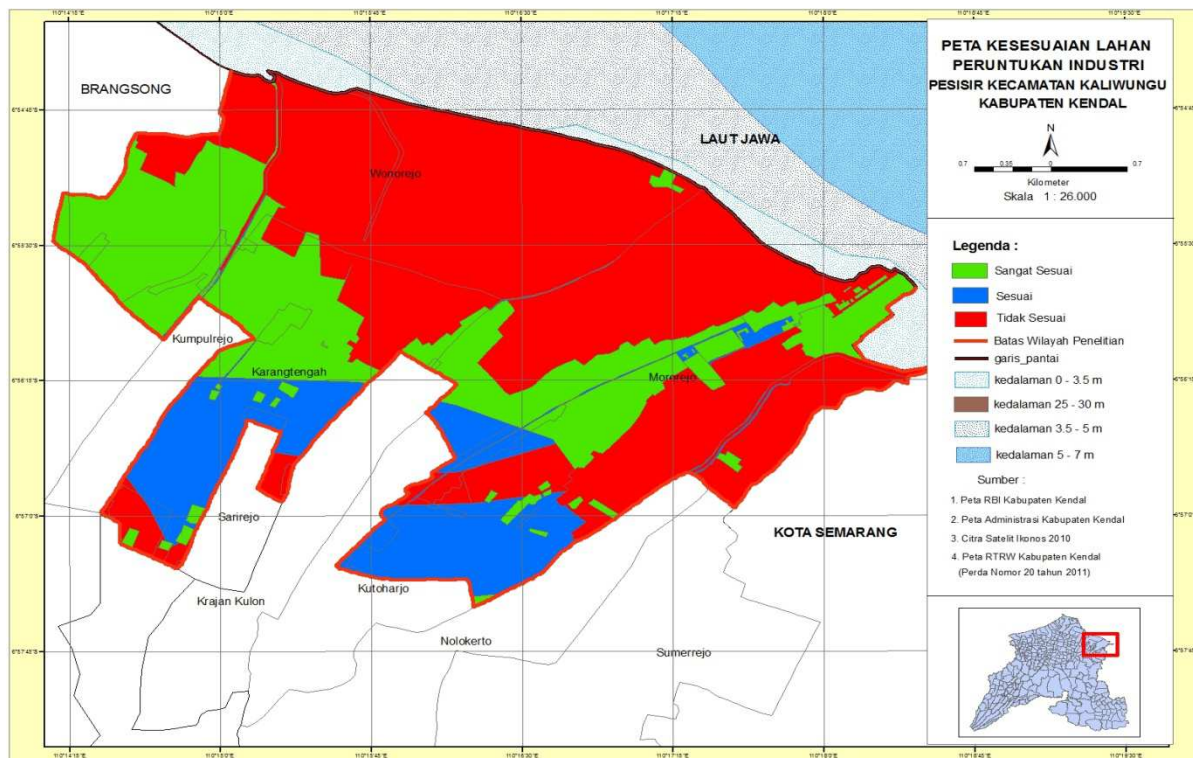
kesimpulan bahwa kawasan lindung tidak dapat dicampuradukkan dengan kawasan budidaya dalam hal ini kawasan perikanan.

### 3.5 Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Kawasan Industri

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal tahun 2011 disebutkan bahwa Kecamatan Kaliwungu digunakan sebagai kawasan strategis ekonomi dan industri. Berdasarkan analisis hasil interpretasi citra satelit dengan Sistem Informasi Geografis dan observasi lapangan terhadap penggunaan lahan berdasarkan Perda tersebut diperoleh beberapa kawasan yang sangat sesuai untuk kawasan industri seluas 858.561 m<sup>2</sup>. Kawasan yang sesuai untuk peruntukan industri seluas kurang lebih 856.891 m<sup>2</sup>. Dari perencanaan kawasan strategis industri dan ekonomi yang berada di sebagian besar wilayah Desa Wonorejo dan Desa Mororejo tidak sesuai dengan kriteria penggunaan lahan untuk kawasan industri, dengan luas kurang lebih 22.134.954,57 m<sup>2</sup> atau sekitar 22 km<sup>2</sup>. Kesesuaian lahan kawasan pesisir Kecamatan Kaliwungu secara umum adalah sesuai bersyarat, dimana pada lokasi-lokasi tertentu dapat dimanfaatkan untuk peruntukan kawasan industri dengan memberikan perlakuan peningkatan pengetahuan/teknologi yang lebih tinggi atau dengan perlakuan tambahan dengan biaya yang rasional (Gambar 2).

### 3.6 Kompatibilitas Zonasi Kondisi Eksisting Dengan RTRW

Berdasarkan analisis dapat diketahui bahwa pemanfaatan yang ada saat ini belum mengakomodasikan bentuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai zonasi, dimana pada zona-zona yang seharusnya membutuhkan pengendalian justru dimanfaatkan sebagai pertambakan dan industri, beberapa areal mangrove yang terkonversi menjadi pertambakan masyarakat. Beberapa kawasan permukiman akan dikonversi menjadi kawasan pemanfaatan khusus berupa kawasan strategis ekonomi dan industri.



Gambar 2. Peta Kesesuaian Lahan Peruntukan Industri di Pesisir Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal

Hal tersebut sangat berbahaya untuk waktu mendatang apabila tidak segera dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang terutama untuk zona-zona yang seharusnya menjadi daerah konservasi dan penyangga yang justru dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya.

Hasil interpretasi citra satelit dan observasi langsung di lapangan Berdasarkan RTRW Kabupaten Kendal periode 2011-2031 telah ditetapkan bahwa sebagian besar wilayah Desa Mororejo dan Desa Wonorejo diarahkan penggunaannya untuk kawasan industri. Sementara sebagian kawasan Desa Wonorejo diarahkan

peruntukannya untuk kawasan perikanan. Namun demikian, pada saat ini sebagian besar masih berupa pertambakan dan sebagian permukiman.

### **3.7 Kompatibilitas Zonasi Pemanfaatan Ruang Dalam RTRW Kabupaten Kendal**

Berdasarkan peta RTRW Kabupaten Kendal periode 2011-2031 dapat dianalisis kesesuaian perencanaan antar kawasan di pesisir Kecamatan kaliwungu Kabupaten Kendal. Kawasan satu dengan yang lain akan saling berpengaruh dan memberi makna bahwa kawasan tersebut sesuai atau dapat menimbulkan konflik terhadap kawasan yang lain.

Berdasarkan analisis dapat dijelaskan bahwa zonasi kawasan yang ada di pesisir Kecamatan Kaliwungu berdasarkan RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2011 meliputi kawasan industri, kawasan pelabuhan, kawasan perikanan dan permukiman. Dalam peta RTRW Kabupaten Kendal tahun 2011 dijelaskan bahwa perencanaan kawasan pelabuhan berada dalam kawasan strategis ekonomi dan industri. Hal ini menunjukkan kesesuaian kawasan atau saling mendukung antar kawasan. Pada sisi lain kawasan strategis industri berdampingan dengan kawasan perikanan. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antar zonasi dan berpotensi konflik pemanfaatan.

### **3.8 Persepsi Pemangku Kepentingan pada Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal**

Persepsi pemangku kepentingan terhadap pola pemanfaatan ruang kawasan pesisir Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal berdasarkan empat aspek, secara umum memandang penting dari aspek lingkungan. unsur pemerintah dan LSM memiliki persepsi kepentingan terhadap aspek lingkungan sedangkan masyarakat dan pengusaha memiliki persepsi kepentingan dari aspek ekonomi.

### **3.9 Prioritas Kebijakan Pengelolaan dan Pola Pemanfaatan Ruang Pesisir Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal**

Hasil analisis prioritas alternatif kebijakan dari aspek lingkungan terhadap pola pemanfaatan ruang kawasan pesisir Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal terhadap pemangku kepentingan dengan Analisis Proses Hirarki adalah bahwa alternatif kebijakan dengan mempertahankan hutan mangrove di sepanjang pantai sebagai pelindung pantai dipandang sebagai alternatif kebijakan terpenting (bobot nilai 0,610) dibanding dengan alternatif kebijakan yang lain. Menjaga kualitas perairan darat dan laut dengan mengefektifkan IPAL merupakan prioritas alternatif kebijakan yang perlu dilakukan selanjutnya (bobot nilai 0,230). Alternatif kebijakan dengan kompensasi oleh industri apabila terjadi kerusakan lingkungan, menurut pendapat pemangku kepentingan adalah alternatif kebijakan yang kurang penting dibandingkan lainnya (bobot nilai 0,160).

## **4. KESIMPULAN**

### **4.1 Kesimpulan**

Pola pemanfaatan ruang kawasan pesisir Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal pada kondisi saat ini sebagian besar digunakan untuk kawasan budidaya pertambakan dengan luas 4,085 km<sup>2</sup> (17%), permukiman dengan luas 0,936 km<sup>2</sup> (4%), kawasan industri 1,052 km<sup>2</sup> (4%), kawasan mangrove 0,105 km<sup>2</sup> (0,01%), kawasan pelabuhan 0,719 km<sup>2</sup> (3%) dan kawasan wisata bahari 0,119 km<sup>2</sup> (1%). Hasil analisis evaluasi terhadap kesesuaian lahan kawasan pesisir Kecamatan Kaliwungu diperoleh beberapa kawasan yang sangat sesuai untuk kawasan industri seluas 858.561 m<sup>2</sup>. Kawasan yang sesuai untuk peruntukan industri seluas kurang lebih 856.891m<sup>2</sup>. Untuk perencanaan kawasan strategis industri dan ekonomi yang berada di sebagian besar wilayah Desa Wonorejo dan Desa Mororejo tidak sesuai dengan kriteria penggunaan lahan untuk kawasan industri, dengan luas kurang lebih 22.134.954,57 m<sup>2</sup> atau sekitar 22 km<sup>2</sup>.

Penyusunan rencana zonasi kawasan pesisir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal periode 2011-2031, bahwa kawasan industri berdampingan dengan kawasan lindung dan kawasan perikanan, menunjukkan ketidaksesuaian/inkompatibilitas antar kawasan sehingga dapat berpotensi timbulnya konflik pemanfaatan ruang.

Persepsi pemangku kepentingan terhadap pola pemanfaatan ruang kawasan pesisir Kecamatan Kaliwungu, unsur pemerintah dan LSM memiliki persepsi kepentingan pada aspek lingkungan. Sedangkan unsur masyarakat dan pengusaha mempunyai persepsi kepentingan dari aspek ekonomi.

Prioritas alternatif kebijakan pola pemanfaatan ruang kawasan pesisir Kecamatan Kaliwungu dari aspek politik adalah pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai Perda RTRW Kabupaten Kendal. Untuk aspek ekonomi berupa pengembangan kawasan industri untuk mempercepat pembangunan dan menyerap tenaga kerja. Prioritas kebiakan dari aspek sosial budaya adalah meningkatkan kelembagaan masyarakat pesisir. Sedangkan dari aspek lingkungan adalah mempertahankan hutan mangrove sebagai pelindung pantai di sepanjang pantai.

#### **4.2 Saran**

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kemungkinan dampak pembangunan kawasan strategis ekonomi dan industri di kawasan pesisir Kecamatan Kaliwungu untuk mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan.
2. Agar prioritas pemanfaatan wilayah pesisir dapat dilakukan secara optimal maka perlu ditingkatkan pemahaman penentu kebijakan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kendal tentang pengelolaan wilayah pesisir secara bijaksana disamping perlunya revisi RTRW dengan melihat kesesuaian lahan dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir.

### **5. REFERENSI**

- Bengen, Dietrich G dan Burhanuddin, 2003, *Contoh Kurikulum dan Agenda Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu (Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997 – 2003)*, Usaid-Indonesia Resources Management Project Kutipan: Knight, M. dan S. Tighe, (editor) 2003. Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003, Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA. (5 Seri, 30 Buku, 14 CR-ROM).
- Dahuri, J. Rajis, S.P., Ginting dan M.J. Sitepu, 2001, *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Lautan Secara Terpadu*, PT. Pradya Paramitha, Jakarta.
- Gatot Dwi Hendro Wibowo, 2009, Aspek Hukum dan Kelembagaan Dalam Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Wilayah Pesisir, *Jurnal Hukum* 16 (1) : 127 – 144, Januari 2009.
- Rahardjo Adisasmita, 2010, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Graha Ilmu, Jogjakarta.
- Saaty, Thomas, L, 1993, *Pengambilan Keputusan-Bagi Para Pemimpin*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia dan Pulau-pulau Kecil Wilayah Pesisir
- Perda Kabupaten Kendal No. 20 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.